

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Kurikulum

Penulis menggunakan istilah karena seiring berkembangnya zaman kurikulum banyak sekali mengalami perubahan berkat para pakar pendidikan. Sehingga pada aspeknya dapat meliputi segala hal yang bahkan belum akan direncanakan, namun ikut merubah perilaku anak didik. Dan kurikulum yang sekarang bukan lagi sekedar jumlah pelajaran yang direncanakan tetapi meluas. Seluruh kegiatan yang ada didalam maupun diluar kelas pada sudah akan dianggap sebagai kurikulum.

Pengertian kurikulum senantiasa akan berubah dan mengalami perubahan. Tidaklah mungkin sebuah kurikulum itu akan mampu bertahan sepanjang zaman dengan segala pernak-pernik masalah yang akan ditemui. Dan tentunya akan lebih cepat berubah dan berkembang kurikulum ini bersama era digital sekarang dan yang akan datang. Misalnya sesuatu pekerjaan atau kegiatan yang harusnya dilakukan manual sekarang sudah digantikan dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Yang memaksa manusia mempunyai kepandaian lebih dalam aspek kognitif dan psikomotorik

Dunia modern lebih memaksa orang tua bekerja dan menghiraukan putra-putrinya sehingga kurangnya perhatian dan sentuhan lembut dari seorang ibu menyebabkan pembentukan karakter yang gagal. Sehingga dititipkanlah

kepada lembaga-lembaga sehingga orang tua puas dalam bekerja dan tidak repot mengurus putra-putrinya, Padahal pendidikan dalam rumah akan menumbuhkan karakter bawaan yang lebih kuat daripada karakter-karakter yang disajikan oleh lembaga pendidikan. Secara emosional orang tua akan lebih mengerti dan tau bagaimana anaknya akan cepat berkembang. Lambat laun kegiatan disekolah bukan hanya pelajaran semata, akan tetapi sudah menjamah kegiatan yang lebih mendidik di dalam lingkungan maupun diluar lingkungan sekolah layaknya, kesehatan jasmani, lalu lintas, kemandirian anak, pendidikan seksual anak, sosial, agama, entrepreneurship, kepemimpinan dan lainnya.¹³

Maka muncullah definisi kurikulum yang relevan dengan kondisi saat ini, berikut pendapat kurikulum menurut para ahli :

- a. *J. Galen Saylor dan William M. Alexander* dalam buku *Curriculum Planning For The Better Teaching and Learning*, menyatakan Semua hal yang berpengaruh pada anak dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan didalam ataupun diluar kelas maka bisa disebut dengan kurikulum.
- b. *Harold B. ALbertys*. Dalam buku *Reorganizing The High School Curriculum*, menggambarkan kurikulum menjadi acuan yang luas terhadap mata pelajaran, namun seluruh kegiatan dan aktifitas didalam maupun diluar kelas.

¹³Nasution. S, *Asas-Asas Kurikulum*, (PT Bumi Aksara, Jakarta 2008), hlm. 3.

- c. *B. Othanel Smith, W.O Stanley, dan J. Harlan Shores.* Dalam buku *Teachers as Curriculum Planners*. Berpendapat seluruh pengalaman yang disampaikan terhadap anak didik supaya mereka bisa menerka pikiran, berperilaku sesuai dengan lingkungannya.
- d. *William B. Ragan,* pada buku *Elementary Curriculum*. Berpendapat semua program serta kehidupan alam disekolah merupakan rangkaian kurikulum, mulai dari kegiatan-kegiatan kecil didalam kelas hingga kegiatan berat yang ada diluar sekolah.
- e. *J. Lioyd Trump dan Delmas F. Miller* pada buku *Secondary School Improvemant*. Bahwa definisi kurikulum sangatlah luas, mencakup metode pengajaran dan pembelajaran, evaluasi, pembinaan, supervisi, pendataan dan aspek struktural terkait waktu merupakan kurikulum sehingga tidaklah mungkin akan memisahkan antara tiga aspek pokok program, manusia, dan fasilitas.¹⁴

Tidak semua pakar kurikulum mempunyai pendirian yang dangkal seperti yang diungkapkan Hilda Taba, jika definsi terlampau meluas maka bisa akan menyamarkan ketajaman kurikulum itu sendiri sehingga menjadi penghalang untuk pengolahan dan pemikiran. Kurikulum yang terlampau luas justru akan menjadi infungsional. Berbagai tafsiran tentang kurikulum dapat kita lihat melalui penggolongan :

- a. Produk kurikulum, semua yang dihasilkan menajdi karya dari perkembangan kurikulum.

¹⁴*Ibid* , hlm. 4.

- b. Pemrograman kurikulum, patokan sekolah demi tercapainya sebuah tujuan.
- c. Patokan kurikulum pada pembelajaran siswa
- d. Kurikulum menggambarkan pengalaman siswa, ketiga pandangan tersebut sebelumnya berkaitan dengan segala rencana, lain dengan pandangan secara aktual yang menjadi kenyataan terjadi padasetiap siswa.¹⁵

Upaya-upaya para ahli yang diwujudkan kearah terbentuknya teori kurikulum sebagai *science of curriculum* (sebagai disiplin ilmu) akan dikembangkan. Para ahli mengemukakan kesulitan-kesulitan dari berbagai faktor berikut :

- a. *James B. Mac Donald* bahwa kurikulum merupakan *an historical accident* Berlangsung tidak sengaja, tidakberpihak dan tidak sitematis, sehingga pengembangan kurikulum harus didahulukan system secara konseptual yang diuji secara empiris yang sitematis.
- b. *Collin Marsh dan Ken Stafford* bahwa membangun kurikulum itu bukan perkara mudah, banyak pertimbangan-pertimbangan meliputi teori sistematik, hipotesis dalam riset, prediksi-prediksi.
- c. *J. S Man dan Pinar*, bahwa belum ada disiplin kurikulum, hanya saja bahan berupa pikiran para ahli untuk membentuk pola tersebut.¹⁶

Dalam pandangan wilayah pendidikan, terdapat tiga konsep berkaitan dengan kurikulum yaitu (1) substansi, (2) pola(3) bidang pembelajaran. *Pertama*, yang dimaksud kurikulum sebagai substansi adalah pandangan orang terhadap

¹⁵*Ibid*, hlm. 9.

¹⁶Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktek*, Ar-Ruzz, (Jogjakarta 55282, Ar-Ruzz Media Cetakan 1), hlm. 117.

kurikulum saklek kepada rencana yang dibangun untuk kegiatan belajar dan mengajar disekolah secara sistematis serta menggiring opini guru dan siswa kepada tujuan yang ingin dicapai. Karena kurikulum sudah pasti akan merujuk kepada buku induk yang berisi rumusan, dan tujuan. *Kedua*, kurikulum sebagai system adalah setiap kurikulum merupakan komponen sekolah bukan masyarakat walaupun memang disiapkan untuk masyarakat, kurikulum ini mencakup prosedur kerja, struktur personalia.¹⁷ Dalam perkembangan yang lebih lanjut, kurikulum telah diterapkan diwilayah pendidikan yang dimaknai sebagai:

- a. Kurikulum ialah kumpulan dari berbagai macam pelajaran pada satuan pendidikan dan perguruan tinggi sehingga wajib ditempuh demi memperoleh bukti legal berupa ijazah dan kenaikan tingkat. Kurikulum akan cenderung sangat sempit sehingga membawa pengaruh dalam program pendidikan yang sifatnya resmi bahkan terbatas hanya dalam kelas. Guru menjadi poros yang berhak menentukan apa yang mau dan harus dipelajari dalam kelas dan anak didik hanya sebagai objek pasif.
- b. Kurikulum bukan sekadar jumlah mata pelajaran, tetapi keseluruhan proses yang telah dan akan terjadi di dunia pendidikan. Kurikulum model ini dapat menghadirkan implikasi terhadap program pendidikan terkait cakupan proses kegiatan anak didik akan pengalaman belajar.¹⁸

¹⁷Manab Abdul. *Manajemen Perubahan Kurikulum*, (Yogyakarta. 2015. KALIMEDIA), hlm. 3.

¹⁸*Ibid.* hlm. 17.

Dari berbagai pendapat diatas kurikulum sudah akan pasti berganti sesuai kebutuhan zaman tentunya, bahkan beberapa sekolah menengah sudah mulai mengkolaborasikan kurikulumnya dengan muatan lokal dan agama.

2. Kebijakan Pembaharuan kurikulum

Kebijakan kurikulum yang ada di Indonesia sedianya dapat dibedakan menjadi tiga fase, yaitu fase prakemerdekaan, fase kemerdekaan dan reformasi. Paparan kaleidoskop kebijakan perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia dari berbagai masa ke masa yaitu:

a. Kebijakan Kurikulum Pra Kemerdekaan

Kebijakan kurikulum pendidikan fase pra kemerdekaan dilaksanakan oleh kolonialisme, maka kebijakannya dikendalikan langsung oleh para penjajah yang bertujuan untuk menjadikan penduduk pribumi sebagai abdi yang siap untuk penjajah. Kebutuhan akan tenaga kerja yang dituntut bias baca tulis, akhirnya penjajah mulai mendirikan lembaga-lembaga pendidikan terbatas hanya pada anak-anak dari golongan ningrat yang dapat menikmati pendidikan kala itu, yang sebetulnya mereka telah akan disiapkan sebagai pegawai rendahan kolonial. Kerja paksa adalah andalan penjajah dalam hal pengembangan hasil bumi dan usaha mereka ditanah ini yang tentunya membutuhkan pegawai-pegawai yang dapat membaca dan menulis. Dua model kebijakan yang dikendalikan kolonialisme bagi kurikulum pendidikan. *Pertama*, pendidikan kelas dua atau disebut dengan *sekolah ongko loro* diperuntukkan anak-anak pribumi

yang mengenyam pendidikan dengan durasi 36 bulan atau 3 tahun. Kurikulumnya adalah berhitung, membaca dan menulis. *Kedua*, Pendidikan kelas satu, kali ini pendidikan khusus yang disiapkan buat anak-anak pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Durasinya adalah durasi 4 tahun, durasi 5 tahun dan durasi 7 tahun. Kurikulumnya ialah meliputi geografi, sejarah dan ilmu alam.¹⁹ Pada jenjang pembelajaran menengah berdiri *Gymnasium*, siswa yang mampu mengenyam pendidikan ini cuma dari golongan ningrat yang berlangsung selama 3 tahun. Materi ajar adalah seperti bahasa Belanda, Bahasa Inggris, berhitung, Al-Jabar, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu geografi, Sejarah dan pembukuan. Kemudian setelah berjalan lama Model pendidikan ini berganti menjadi MULO (*Meer Uifgebried Order Wijs*) berdurasi 4 tahun lamanya.

Pendidikan tingkat atas pada masa Kolonial meluncurkan AMS (*Algemene Midelbare School*). Durasi pendidikan sampai 3 tahun terbagi menjadi kelas A dan kelas B. spesifikasi pada kelas A Terdiri dari ilmu budaya, kesustraan timur dan kesustraan klasik barat. Adapun kelas B Terdiri dari pengetahuan alam dan ilmu pasti. Pada masa peralihan kolonialisme dari Belanda ke-Jepang, kebijakan kurikulum pun telah berganti dari model Belanda menjadi Kebijakan kurikulum khas Jepang. Mereka mengantinya dengan Kokumin Gako berdurasi pendidikan 6 tahun lamanya. Kurikulumnya lebih menitik

¹⁹Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktek*, Ar-Ruzz, (Jogjakarta 55282, Ar-Ruzz Media Cetakan 1), hlm. 17.

beratkan kepada pendidikan dasar dan kemiliteran demi membantu pertahanan penjajah Jepang.²⁰

b. Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pasca Kemerdekaan

Kurikulum pada pasca kemerdekaan diakhiri dengan reformasi tahun 1998. Ternyata reformasi mengubah dan membawa kabar baik bagi pendidikan di Negeri ini. Terbitnya UUSPN No. 20 Tahun 2003 dengan berbagai turunan undang-undangnya ditandai sebagai awal kebijakan kurikulum selanjutnya. Kebijakan perubahan kurikulum pasca kemerdekaan diawali tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984 dan 1994.

1) Kurikulum 1947

Periode pertama diterapkannya kurikulum tahun 1947 dikenal dengan Rencana Pembelajaran tahun 1947 atau disebut juga dengan istilah *leer plan*.²¹ Ciri yang terdapat pada kurikulum ini menitik beratkan kepada terbentuknya karakter manusia yang mempunyai kedaulatan dan dapat disejajarkan bersama seluruh bangsa di dunia. Kala itu siswa terdidik untuk pandai bersosialisasi dan bernegoisasi dengan orang lain. Ranah afektif dan psikomotorik yang diarahkan kepada kesenian dan

²⁰*Ibid*, hlm. 18.

²¹*Leer Plan* adalah istilah dalam bahasa belanda yang artinya rencana pembelajaran. Kunandar. Implementasi Kurikulum KTSP, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 86.

pendidikan olahraga, dan ditekankan kepada kesadaran bela Negara.²²

2) Kurikulum 1952

Kali ini kurikulum merinci rencana pembelajaran yang diuraikan, hasil yang dikembangkan pada kurikulum berkat penyelidikan pendidikan. Dikolaborasikan dengan hasil lawatan di Surakarta dalam perencanaan pendidikan terurai 1947, namun belum bisa direalisasikan hingga akhirnya rencana tersebut dapat terealisasi tahun 1952 yang disesuaikan pada UU No. 4 Tahun 1950 mencakup pendidikan dan pelajaran.²³

3) Kurikulum 1964

Pada Tahun 1964 pemerintahan telah menyempurnakan sistem kurikulum yang ada di Negeri ini, kebijakan kurikulum ini bernama Rencana Pendidikan 1964 atau disebut dengan Kurikulum 1964. Pokok kurikulum ini pemerintah menginginkan agar ada pembekalan pada pendidikan dasar. Sehingga pendidikan ini telah difokuskan pada Panca Wardhana yang berisi tentang pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya dan moral.²⁴ Adapun prinsip-prinsip Panca Wardhana sebagai sistem pendidikan adalah

- 1) mencintai bangsa dan tanah air, moral serta keagamaan, 2)

²²Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktek*, Ar-Ruzz, (Jogjakarta 55282, Ar-Ruzz Media Cetakan 1), hlm. 32.

²³H.A.R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1955*, (Jakarta, Grasindo, 1955), hlm. 254.

²⁴Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung : Rosda Karya, 2013), hlm.4

pengembangan kecerdasan, 3) pengembangan emosional dan keindahan lahir batin, 4) pengembangan kerajinan tangan, dan 5) pengembangan jasmani.²⁵

4) Kurikulum 1968

Kebijakannya Ada pada perubahan tatanan kurikulum pendidikan dan Panca Wardhana, digantidengan pendidikan Pancasila, ilmu pengetahuan dasar, dan kecakapan. Pokok kurikulum ini mengarah kepada pengembangan kecerdasan dan keterampilan serta pengembangan jasmani. Materi pengembangannya hanya bersifat teoritis.

5) Kurikulum 1975

Kurikulum pada masa Ini menekankan kepada tujuan pembelajaran yang jauh lebih efektif dan efisien. Pada masa itu guru diwajibkan membuat perencanaan dan persiapan bahan ajar sesuai dengan acuan pokok pada proses belajar dan mengajar. Kurikulum pada waktu itu membuat seluruh proses belajar lebih tepat dan sistematis.²⁶

6) Kurikulum 1984

Kurikulum pada masa ini menggunakan konsep *Proses Skill Approach*, kurikulum ini menggantikan kurikulum yang telah diterapkan sebelumnya yakni kurikulum 1975. Ciri-ciri

²⁵Intruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 2 (Panca Wardhana/Hari Krida) Tahun 1861.

²⁶Kunandar, *Implementasi Kurikulum KTSP*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 87.

kurikulumnya adalah 1) Memilikiorientasi pada tujuan belajar (instruksional), 2) model pembelajaran menerapkan CaraBelajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL), 3) materi belajar disusunmelalui pendekatan spiral, 4) menjelaskansebelum member tugaslatihan, 5) materi yang diberikanmenuntut kesiapan dan kematangan siswa, 6) menggunakan keterampilan (Proces Skill Approach).²⁷sifat sentralistik dari kurikulum ini dan kurangnya sosialisasi maka banyak penolakan yang terjadi kala itu.

7) Kurikulum 1994

Kebijakan pada kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang telah disesuaikan dengan UU Nomor. 2 tahun 1989 yaitu tentang Sitem Pendidikan Nasional. Pokok kurikulum tertuju kepada penyelesaian soal dan pemecahan masalah. Kurikulum ini menekankan pada Link And Match yaitu keterkaitan dengan dunia kerja dan industri. Pada akhirnya mengalami penolakan juga setelah adanya dehumanisasi (tidak memanusiakan manusia).

c. Kebijakan Kurikulum Masa Reformasi

Masa reformasi telah membawa dampak secara nasional bagi perkembangan dunia pendidikan. UUSPN No. 20 Tahun 2003 adalah babak baru dalam dunia pendidikan nasional. Kebijakan baru

²⁷Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), hlm. 9-10.

dikeluarkan sebagai amanat undang-undang, yang sampai saat ini dikategorikan menjadi tiga yaitu, kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, dan Kurikulum 2013. Perubahan tersebut memberikan stimulus dan perkembangan terkait berbagai masalah yang dihadapi seperti sistem, sosial, politik, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut paparan kurikulum masa reformasi :

1) Kurikulum 2004

Kebijakan kurikulum ini dikenal dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pokok kurikulum ini menitikberatkan kepada kemampuan menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan standart performance yang telah ditetapkan. Karakteristik yang terdapat pada KBK yaitu: menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa, pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual.

2) Kurikulum 2006 KTSP

Kebijakan kurikulum ini dikenal sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Ciri khas dari kurikulum ini ialah guru diberikan kebebasan untuk menentukan atau membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan keadaan dan lingkungan

sekolah berada. Yang disebabkan oleh Kerangka Dasar (KD), Standart kompetensi lulusan (SKL), Standart Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD). Standart kurikulum ini telah ditetapkan oleh Badan Nasional Standart Pendidikan. Maka kurikulum disusun sesuai kebutuhan yang ada pada potensi daerah masing-masing.

3) Kurikulum 2013

Kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Stuan Pendidikan masih dianggap memberatkan peserta didik baik substansi maupun metodologinya. Berdasarkan hasil dari kajian, eksperimen dan evaluasi, maka muncul Kurikulum 2013 penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Munculnya kurikulum 2013 diprediksi mampu melengkapi kekurangan yang terdapatdi kurikulum sebelumnya yaitu KurikulumTingkat Stuan Pendidikan (KTSP). Pokok penyusunan kurikulum 2013 ada pada pengembangan sikap, pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang dipadukan menggunakan penguasaan keterampilan pengembangan sikap spiritual yang sejalan berdasarkan karakteristik Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang diharapkan dapat mengembangkan budaya spiritual dilingkungan sekolah. Senada dengan misi pendidikan nasional yang menitik beratkan potensi siswa supaya tumbuh sebagai manusia yang mempunyai keimanan dan ketaqwaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak, inovatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang menjunjung tinggi demokrasi.²⁸

3. **Komponen Kurikulum**

Kurikulum bisa disebut juga sebagai susunan atau tatanan baik untuk manusia dan seluruh makhluk hidup yang memiliki susunan anatomi. Terdapat 6 komponen inti kurikulum yang saling berkaitan yaitu, 1) komponen tujuan, 2) komponen materi, 3) komponen strategi, 4) komponen pengorganisasian kurikulum, 5) komponen evaluasi, dengan definisi berikut:

a. **Komponen Tujuan**

Kurikulum bertujuan untuk memberikan rencana pencapaian sistematis bagi dunia pendidikan khususnya pada ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. Menurut Permendiknas No.22 Tahun 2007 tentang tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yaitu:

- 1) Pendidikan dasar yaitu, kecerdasan mendasar, pengetahuan, akhlak mulia, kepribadian dan keterampilan hidup mandiri.
- 2) Pendidikan menengah yaitu, meningkatkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan hidup mandiri serta mengikuti pendidikan selanjutnya.
- 3) Pendidikan menengah kejuruan yaitu, meningkatkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan

²⁸UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

keterampilan hidup mandiri serta mengikuti pendidikan selanjutnya sesuai kejuruan.

- 4) Pendidikan institusional yaitu, tujuan pendidikan yang dikembangkan dikurikuler dalam setiap mata pelajaran disekolah.²⁹

b. Komponen Materi

Komponen materi yaitu, bahan-bahan yang di kaji yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan kedalam proses pendidikan hingga tercapainya komponen tujuan. Interaksi siswa dengan lingkungan, manusia, alat-alat, dan ide-ide dianggap sebagai belajar. Tugas guru adalah mendampingi siswa mencapai beberapa hal yang tersebut diatas, untuk mendorong siswa lebih interaktif produktif maka dibuatlah rencana/bahan ajar.³⁰ Sebagaimana keterangan diatas materi disusun menjadi:

- 1) *Teori*, susunan konstruksi dengan konsep penyajian pendapat akan gejala serat menspesifikasikannya menjadi variabel-variabel.
- 2) *Konsep*, defines singkat dari fakta ataupun gejala
- 3) *Generalisasi*, kesimpulan yang bersifat umum yang berasal dari hal-hal khusus didapat dari analisis, pendapat atau hasil dari penelitian.

²⁹<http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-kurikulum-fungsi-komponen>. Html. Diakses tanggal 28 Desember 2019.

³⁰Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 102.

- 4) *Prinsip*, ide pokok dari berbagai konsep.
- 5) *Prosedur*, langkah berurutan.
- 6) *Fakta*, informasi penting dari materi, memuat terminology, manusia serta tempat kejadian.
- 7) *Istilah*, pemaknaan baru yang dikenalkan dalam materi.
- 8) *Contoh*, tindakan yang diambil untuk menstimulasi suatu pendapat setelahnya.
- 9) *Definisi*, penjelasan makna atau arti dalam garis besar.
- 10) *Preposisi*, cara yang digunakan dalam penyampaian proses belajar.

b. Komponen Metode

Adapun metode kurikulum meliputi metode pengajaran, metode penilaian, metode bimbingan, metode penyuluhan dan persiapan kegiatan sekolah.³¹ Strategi juga melibatkan perencanaan, metode dan bahan perlengkapan kegiatan terencana demi mencapai tujuannya. Strategi dalam pembelajaran mengupayakan rencana tindakan terhadap seluruh komponen penunjang demi tercapainya tujuan pembelajaran. Strategi cenderung bersifat langsung, metode dengan teknik pembelajaran tidak berupa penyajian siap dari konselor akan tetapi lebih bersifat masing-masing, didapat langsung dari sumber di sekitar.

c. Komponen Evaluasi

Melakukan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap peserta didik kepada siapa yang berhak dan tidak berhak lulus. Ditinjau

³¹Muhammad Zaini, *Pengembangan Kurikulum, Konsep Implementasi, Evaluasi dan Inovasi*, (Yogyakarta, Teras. 2009), hlm. 80.

dari fungsinya evaluasi yang demikian ini kurang selektif karena pada dasarnya seorang siswa berhak memiliki kemampuan dasarnya menilik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya.³² Evaluasi kurikulum harusnya dilakukan secara terus-menerus hingga dapat diketahui berdasarkan acuan dan tolak ukur yang jelas. Evaluasi digunakan untuk mengetahui dua hal utama yaitu evaluasi terhadap hasil kurikulum dan proses kurikulum.³³

Evaluasi kurikulum yang dimaksudkan sebagai penilaian terhadap efisiensi, efektifitas, relevansi dan produktifitanya demi tercapainya tujuan pembelajaran. Efisiensi berhubungan pada penerapan waktu, tenaga, sarana dan prasarana serta optimalisasi sumber belajar. Efektifitas berkaitan dengan cara atau strategi jitu dalam pencapaian tujuan. Relevansi berkenaan dengan kesesuaian program dan pelaksanaan berdasarkan kondisi aktual dilapangan. Produktifitas berkenaan dengan optimalnya hasil pencapaian.³⁴

4. Kurikulum Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Rumusan pendidikan secara nasional akan mencerdaskan masa depan bangsa dan mengembangkan bangsa Indonesia secara utuh, yaitu bangsa yang mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang

³²Lias Hasibuan, *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan.*(Jakarta: GaungPersada, 2010), hlm.38-39.

³³Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek.* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010),hlm. 108.

³⁴Hamid Syarif, *Pengembangan Kurikulum,* (Pasuruan; Garoeda Buana Indah, 2009).hlm. 108.

Maha Esa, berbudi pekerti , memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat, kepribadian baik, kemandirian serta mempunyai rasa tanggung jawab utuh kepada Negara republik Indonesia, yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional.Sumber Kurikulum pendidikan Agama Islam kembali kepada tujuan pendidikan Islam itu sendiri.

Paham pragmatisme menyatakan bahwa menitik beratkan kemanfaatan hidup manusia ketika didunia, setandarnya pun relative bergantung kepada kebudayaan dan peradaban manusia yang sedang dan akan berlangsung. UU Sitem Pendidikan Nasional Tahun 2003 mengenai kurikulum yang berisi tentang perencanaan, tujuan, isi, bahan ajar dan metode yang diterapkan sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran demi tercapainya tujuan sebuah pendidikan.³⁵ Sedangkan pada Pasal 36 Ayat 3 dijelaskan lebih detail bahwa kurikulum telah disesuaikan dengan tingkatan dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- 1) Peningkatan keimanan dan ketaqwaan
- 2) Penerapan akhlak mulia
- 3) Potensi siswa, kecerdasan siswa dan minat siswa
- 4) Keragaman potensi yang ada di daerah
- 5) Pengembangan daerah secara nasional
- 6) Kebutuhankerja
- 7) Berkembangnya ilmu pengetahuan

³⁵Darmaningtyas DKK, *Membongkar Ideologi Pendidikan, Jelajah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*,(Yogyakarta: Resolusi Press, 2014), hlm. 237.

- 8) Beragama
- 9) Perkembangan global
- 10) Persatuan secara nasional dan nilai-nilai kebagaan.³⁶

Materi-materi pokok Pendidikan Agama Islam adalah, bahan ajar, aktivitas pengajaran dan pengalaman yang difokuskan kepada unsur-unsur ketauhidan. Misalkan kalimat tauhid yang dilantunkan dalam prosesi upacara keagamaan melalui adzan yang diperdengarkan kepada bayi ketika baru lahir memperdengarkan kepada si bayi hakekat dari sebuah kehidupan dan senantiasa terbimbing dalam suasana dan kondisi apapun sebagai hamba Allah SWT.³⁷ Islam sebagai agama wahyu sangat mengedepankan orientasi hidup yang seimbang antara duniawi-ukhrawi yang sudah menetapkan dasar teoritis dalam ayat-ayat al-Qur'an, yang tercantum dalam Surah al-Hasyr (59): 18.

Hai orang-orang mukmin, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri manusia memperhatikan hal-hal apa yang hendak dilakukan bagi hari esoknya, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut memberikan sumber pengetahuan yang sangatlah luas. Ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat menjadi pedoman keimanan (manusia sebagai khalifah), dan dapat rangkum menjadi tiga sumber teori ilmiah. Pertama, Allah sebagai sumber pokok ilmu pengetahuan. Kedua, kehidupan sosial manusia sudah multi dimensi perkembangannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, perkembangan kearah alam

³⁶Darmaningtyas DKK, *Membongkar Ideologi Pendidikan, Jelajah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, hlm. 237.

³⁷*Ibid.* hlm. 252.

sebagai sarana pendukung kehidupan manusia.³⁸Oleh sebab itu orientasi kehidupan manusia pada pendidikan agama Islam ada keterkaitan dengan pengertian terhadap fungsi keberadaan manusia di muka bumi sebagai pemimpin. Agar fungsi kehidupan manusia seimbang maka diperlukan peran ilmu pengetahuan untuk menjaga hubungan manusia dengan sang khaliq, hubungan manusia dengan makhlukNya, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Pendidikan islam memerlukan proyeksi yang bersifat inovatif (*Inovatif learning*, tidak hanya melestarikan semua yang telah ada (*Maintenance learning*). Hal-hal diatas relevan dengan apa yang dikatakan oleh Abi Thalib, ‘’Didiklah anak kalian dengan didikan yang pernah didikan kepada kalian, karena ia telah akan diciptakan untuk generasi zaman yang berbeda dengan zaman kalian’’. Nasehat diatas membuktikan ada orientasi baru kepada tujuan pendidikan anak didik demi kehidupan yang akan mereka ajalani dimasa yang akan datang.

Menurut definisi diatas Hasan Langgulung mendefinisikan kurikulum secara spesifik untuk pendidikan agama Islam, bersifat fungsional, yang bertujuan menghasilkan dan mencetak manusia muslim, paham dengan Tuhannya, berakhlakul karimah, sanggup menikmati kehidupan mulia di masyarakat serta mendorong dan mengembangkan kehidupan sekitar.³⁹

³⁸Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2007), hlm. 63.

³⁹Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*. (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987), hlm. 131.

Berkaitannya dengan kurikulum pendidikan agama Islam, para ahli mempunyai gagasan yang berbeda dalam hal istilah dan bentuk berdasarkan al-Qu'an dan al-Hadist yang diterapkan pada kurikulum pendidikan Islam. Ibnu khaldun menetapkan tiga kategori ilmu pengetahuan Islam yang bersumber dari al-Qur'an yang harus dimasukkan ke dalam sekolah. *Pertama, ilmu lisan* (bahasa) yang terdiri dari ilmu lughah, nahwu, sorof, many, sastra dan syair-syair. *Kedua, ilmu naqly*, yang dinukilkan dari al-Qur'an dan Hadits yang terdiri dari qira'ah, tafsir, sanad, tashih dan istinbath dari *qanun fiqhiyah*. Ketiga, ilmu aqly yang mengembangkan daya pikir seperti filsafat dan kelompok ilmu-ilmu lainnya seperti, ilmu Logika (*ilmu mantiq*), ilmu pengetahuan alam, teknologi, ilmu teknik, ilmu perbintangan, dsb.

b. Komponen-Komponen Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Kurikulum adalah sistem didalam pendidikan maka tidaklah lepas dari komponen-komponen. Komponen-komponen pendidikan agama Islam yang dimaksud adalah:

1. Tujuan

Para cendekiawan islam membagi tujuan kurikulum menjadi dua bagian, yaitu *pertama*, dalam hal keagamaan adalah mencetak pribadi yang siap melaksanakan syariat Islam. Melewati berbagai proses pendidikan spiritual untuk dapat mengenali Tuhannya.. Kedua,

berorientasi keduniaan demi menuju kehidupan sejahtera didunia ndan kemanfaatannya.⁴⁰

2. Materi

Materi merupakan komponen pendidikan yang disusun secara sistematis demi menunjang proses pembelajaran yang ditetapkan. Isi materi merupakan bahan-bahan pembelajarantelah dianggap sesuai jika telah memenuhi standart kompetensi., oleh sebab itu jika ditinjau dari segi filsafat progresivisme materi meliputi keperluan, kemauan dalam kehidupan siswa. Sedangkan ditinjau dari filsafat konstruktivisme, bentuk tematik terdiri dari materi dan topic yang diambil dari masalah krusial, layaknya ekonomi, sosial dan budaya.⁴¹

3. Metode

Supaya materi yang disampaikan tepat dan membekas pada siswa maka seorang pengajar wajib menggunakan cara yang diterapkan untuk menopang proses belajar, hingga hasil belajar tercermin pada perilaku siswa sehari-hari. Jika metode yang diterapkan telah memenuhi standar maka akan mencetak hasil yang baik menurut pendidikan agama Islam.⁴²

4. Evaluasi

Evaluasi dimaksudkan sebagai penilaian terhadap hasil sebuah proses, yaitu proses pembelajaran untuk memproyeksikan sejauh apa efesiensi,

⁴⁰Anin Nur Hayati, *Kurikulum Inovasi, Telaah Terhadap Pengembangan Kurikulum Pesantren*, (Yogyakarta: Teras, 2010),hlm. 34.

⁴¹Sukiman, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik Pda Perguruan Tinggi*,hlm. 17.

⁴²Anin Nur Hayati, *Kurikulum Inovasi, Telaah Terhadap Pengembangan Kurikulum Pesantren*, (Yogyakarta: Teras, 2010), 41

efektifitas, relevansi dan produktifitas rencana yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan pendidikan. Oleh sebab itu evaluasi diposisikan sebagai umpan balik kepada tujuan, materi, dan metode supaya bermanfaat pengembangan kurikulum.⁴³

c. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Pengembangan kurikulum ialah proses perencanaan kurikulum yang diharapkan dapat mendukung rencana kurikulum secara luas dan spesifik. Proses ini terhubung langsung berdasarkan pemilihan dan pengaturan bermacam-macam komponen situasi belajar, penetapan jadwal organisasi kurikulum serta spesifikasi tujuan yang telah dirumuskan yang memudahkan proses belajar mengajar.⁴⁴ Menilik dari pernyataan diatas bahwa kurikulum menjadi sistem kuat dalam dunia pendidikan maupun pengorganisasiannya demi tercapainya tujuan pendidikan melalui visi, misi madrasah. Berikut adalah landasan kurikulum pendidikan agama Islam :

- a) Aspek Agama, kurikulum pendidikan agama Islam haruslah bersandar kepada al-Qur'an dan Hadits, serta sumber-sumber furu'iyah (cabang-cabangnya).
- b) Aspek Falsafah, dilihat dari sisi epistemologi, ontology dan aksiologi maka nilai yang mengandung kebenaran ialah memiliki dasar yang berpedoman terhadap aspek filosofi, tujuan, isi, pengorganisasian kurikulum .

⁴³Ali Mudlofir, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 11.

⁴⁴Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Rosda Karya, 2008), 183.

- c) Aspek Psikologis, sebagai landasan untuk merumuskan kurikulum yang relevan dengan bakat, serta melihat dan menilai perbedaan diantara siswa.
- d) Aspek Sosial, menggambarkan kurikulum pendidikan agama Islam mengenai dasar sosial, menunjukkan ciri muslim dan kebudayaannya, berupa pengetahuan, nilai, berfikir, adat istiadat dan seni.⁴⁵

Diharapkan dengan dasar-dasar pengembangan kurikulum pendidikan islam tersebut diatas dapat mengeluarkan dan membentuk generasi muslim yang sesuai dengan falsafah pendidikan agama Islam.

d. Rumpun Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan. antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya dalam lingkungannya.

Namun secara spesifik, ruang lingkup bahan pembelajaran pendidikan agama Islam meliputi empat unsur yaitu:

1. Al-Qur'an Hadist
2. Akidah Akhlak
3. Fiqih
4. Sejarah Kebudayaan Islam

Kurikulum Pendidikan Agama Islam adalah bahan-bahan pendidikan agama islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman

⁴⁵Ramaliyus & Syamsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, *Telaah Sistem Pendidikan Para Tokohnya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009) 195.

yang dengan sengaja dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Tahun 2014 menyebutkan bahwa kurikulum madrasah khususnya jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs), telah menggunakan kurikulum 2013. dengan demikian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam proses pembelajarannya diharuskan menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang dipakai dalam kurikulum 2013.⁴⁶

Adapun struktur dan muatan kurikulum pendidikan agama Islam pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 1

Struktur Kurikulum Madrasah Tsanawiyah

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER-MINGGU		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1.	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
	b. Akidah Akhlak	2	2	2
	c. Fiqih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6
4.	Bahasa Arab	3	3	3
5.	Matematika	5	5	5
6.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8.	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B (Mulok)				
1.	Seni Budaya	3	3	3
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
3.	Prakarya	2	2	2
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu		46	46	46

Sumber Data: Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 207 Tahun 2014

⁴⁶Lihat *Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 207 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah*, hlm. 2

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam masuk dalam rumpun mata pelajaran kelompok A yang kontennya dikembangkan oleh pusat (*sentralisasi kurikulum*) yang terdiri dari mata pelajaran Al-qur'an Hadits, Aqidah Ahlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Alokasi waktu yang didistribusikan kepada setiap jenjang kelas terdiri dari, kelas VII sebanyak 2 Jam Pembelajaran (JP), Kelas VIII sebanyak 2 Jam Pembelajaran (JP) dan Kelas IX sebanyak 2 Jam Pembelajaran (JP).

5. Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian

Implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁴⁷ Sedangkan menurut Fullan, implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktek tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.⁴⁸

Pendapat lain dikemukakan oleh Syafruddin Nurdin mengatakan bahwa:

Implementasi adalah suatu proses, suatu aktifitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain tertulis agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut.⁴⁹

Sementara itu, kurikulum merupakan salah satu komponen yang

⁴⁷Sunarso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Relity Publisher, 2008), hlm. 178

⁴⁸Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013, Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), hlm.6

⁴⁹Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2012), hlm.70

sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Oleh karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan.

Istilah kurikulum telah dikenal dalam dunia pendidikan sebagai suatu istilah yang tidak asing lagi. Secara *etimologis* kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* artinya pelari dan *curere* artinya tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis *start* menuju garis *finish*.⁵⁰

Hass dan Parkey mengemukakan bahwa “*the curriculum is all of the experiences that individual learners have a program of education whose purpose is to achieve theory and research or past and present professional practice*”. Pernyataan tersebut berarti bahwa kurikulum merupakan segala pengalaman yang dipelajari oleh individu dalam sebuah program pendidikan yang bertujuan untuk mencapai teori dan praktik penelitian atau masa lalu maupun saat ini.⁵¹

Pengertian kurikulum menurut Oemar Hamalik:

Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan siswa, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar siswa dalam

⁵⁰Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 230

⁵¹Hass, Glen and Parkey, F.W, *Curriculum Planning: A New Approach*. (USA: Allyn and Bacon, 1974), h. 3

satuan pendidikan dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu.⁵²

Jika dikaitkan dengan mata pelajaran, maka kurikulum dapat dimaknai dalam tiga konteks, yaitu kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program belajar. Kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran dimaksudkan bahwa kurikulum berisi patokan yang harus diikuti dan dicapai oleh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai pengalaman belajar yaitu siswa mengikuti pembelajaran merupakan tanggung jawab dari guru atau sekolah ketika di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah berdasarkan kegiatan pendidikan yang diikuti. Kurikulum sebagai perencanaan program belajar yaitu guru yang merencanakan program pembelajaran bertumpu pada kurikulum yang sudah ada dan dikembangkan agar siswa mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.⁵³

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (19), kurikulum adalah “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.⁵⁴

⁵²Omar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. (Bandung: Remaja, Rosdakarya, 2008), h. 91

⁵³Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 2

⁵⁴Lihat *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, hlm. 2

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dalam kosa kata arab, istilah kurikulum dikenal dengan istilah *manhaj*, yakni jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia dalam bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum dapat diartikan jalan yang terang dilalui oleh seorang tenaga pendidik beserta dan peserta didik untuk menggabungkan nilai *kognitif, afektif dan psikomotorik*.⁵⁵

Istilah kurikulum mengalami perkembangan arti seiring dengan perkembangan dan dinamika yang ada pada dunia pendidikan. Sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai perangkat materi pendidikan dan pelajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Istilah ini kemudian digunakan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar pendidikan dalam dunia pendidikan yang dalam masyarakat umum dikenal dengan nama ijazah.

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa kurikulum adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang disusun secara sistematis dan terencana yang diajarkan pada peserta

⁵⁵Omar Muhammad, Al-Thoumy Al-Syaibany, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 478.

didik selama studi berlangsung. Kurikulum mengacu pada suatu rencana tertulis yang menguraikan apa yang akan dipelajari para siswa. Kurikulum juga merupakan suatu metode dan pengetahuan yang ditentukan yang dapat dikomunikasikan. Kurikulum harus dapat diwujudkan dalam kelas riil, misalnya yang berbasis pada pengalaman para siswa di bawah bimbingan para guru. Kurikulum menjadi rencana yang dibuat untuk memandu pelajaran di dalam sekolah tersebut, yang pada umumnya dalam bentuk dokumen yang *retrievable* serta aktualisasi semua rencana tersebut di dalam kelas.

Jika kurikulum diartikan sebagai sebuah proses yang terencana dan sistematis, maka manajemen kurikulum dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.⁵⁶

Dari uraian di atas, maka implementasi kurikulum dapat dimaknai sebagai berikut: *Pertama*; implementasi kurikulum sebagai aktualisasi rencana atau konsep kurikulum. *Kedua*; implementasi kurikulum sebagai proses pembelajaran. *Ketiga*; implementasi kurikulum sebagai realisasi ide, nilai dan konsep kurikulum.

⁵⁶Rusman, *Manajemen kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.3

Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kurikulum, harus dibutuhkan sebuah tahapan yang bersifat sistematis, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara terstruktur. Dengan demikian fungsi manajemen sangat dibutuhkan untuk mengelolah pelaksanaan kurikulum dalam satu pendidikan.

Manajemen Kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan dititik beratkan pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Manajemen Kurikulum adalah proses kerjasama dalam pengolahan kurikulum agar berguna bagi lembaga untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Manajemen Kurikulum adalah upaya untuk mengurus, mengatur, dan mengelola perangkat mata pelajaran yang akan diajarkan pada lembaga pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Manajemen kurikulum merupakan suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematis dalam rangka ketercapaian suatu kurikulum itu sendiri. sehingga dalam implementasinya harus dikembangkan berdasarkan dengan prinsip manajemen berbasis pada Madrasah. Hal ini dilakukan karena prinsip otonomi sekolah yang diembankan pada madrasah senantiasa dikelola berdasarkan dengan skala prioritas kebutuhan madrasah.⁵⁷

⁵⁷*Ibid*, hlm. 3

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kurikulum di maksudkan agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, menilai kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum, baik kepada masyarakat maupun pada pemerintah.

Beberapa ruang lingkup studi yang dikembangkan, yaitu:

- 1) Perencanaan dan pengembangan kurikulum, di dalam manajemen ini akan dipelajari masalah perencanaan kurikulum dan pengembangan selanjutnya penting mendapat perhatian, karena terkait erat dengan faktor-faktor mendasar, peran berbagai pihak dan metodologi pengembangan itu sendiri, sehingga merupakan suatu proses keseluruhan kegiatan dan pengembangan kurikulum
- 2) Impelementasi pelaksanaan kurikulum. Bidang ini mempelajari yang berkaitan dengan keterlaksanaan kurikulum disekolah atau lembaga pendidikan dan latihan. Peran administrator (kepala sekolah) dan guru mendapat sorotan lebih tajam, dalam artian administratif.
- 3) Supervise pelaksanaan kurikulum. Bidang ini membahas lebih mendasar dan meluas, sebagai erat kaitannya dengan upaya pembinaan dan pengembangan kemampuan personal sekolah, yang mendapat tanggung jawab dalam proses pelaksanaan kurikulum, dan dengan cara bagaimana mereka seharusnya dipersiapkan agar mampu bertindak sebagai supervisor.
- 4) Pemantauan dan penilaian kurikulum. Peranan dan fungsinya sangat penting dalam rangka pengembangan, pelaksanaan, supervisi dan perbaikan kurikulum.
- 5) Perbaikan kurikulum. Bidang ini harusnya mendapatkan perhatian yang lebih oleh sebab erat kaitannya dengan upaya membina relevansi pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan sejalan dengan perkembangan masyarakat secara menyeluruh, yang ada akhirnya dengan dikembangkan suatu kurikulum yang lebih baik.
- 6) Desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum, perlu dikaji secara lebih lanjut berkaitan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah.

- 7) Masalah ketenagaan dalam pengembangan kurikulum serta model kepemimpinan yang serasi pada konteks masyarakat yang berkembang dinamis dewasa ini.⁵⁸

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa implementasi kurikulum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci sistematis, terstruktur, terorganisir dan komprehensif tentang segala sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan untuk pencapaian tujuan, visi dan misi madrasah. pelaksanaan dan pengelolaan itu terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap mata pelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, serta seluruh unsur penunjang yang dimiliki oleh satuan pendidikan.

b. Prinsip dan Fungsi Implementasi Kurikulum

Kurikulum di sekolah merupakan penentu utama kegiatan sekolah. Segala aktivitas siswa mengacu pada kurikulum yang ada. Berdasarkan hal tersebut, kurikulum harus tepat dirumuskan melalui perencanaan yang matang, pengorganisasian, pelaksanaan yang sistematis, dan evaluasi kurikulum. Program pendidikan/kurikuler tersebut, sekolah/ lembaga pendidikan berusaha mendorong siswa agar berkembang dan tumbuh secara tepat sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Keterlibatan masyarakat pun ikut andil mengambil bagian penting dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat memahami,

⁵⁸Omar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. (Bandung: Remaja, Rosdakarya, 2008), hlm.21

membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, menilai kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.⁵⁹

Implementasi Kurikulum membicarakan mengenai sistem pelaksanaan dari sumber-sumber yang ada di sekolah sehingga kegiatan pelaksanaan kurikulum ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Perkembangan kurikulum di Republik Indonesia sampai saat ini telah melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disusul dengan Permendiknas 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, kemudian disusul dengan Permendiknas 23 tentang Standar Kompetensi Kelulusan.

Pemberlakuan Undang-Undang dan Permendiknas itu menjadi kekuatan hukum bagi penyelenggara pendidikan untuk menata kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sehingga dengan demikian undang-undang dan peraturan menteri pendidikan nasional itu perlu dibaca dan dipahami.

Untuk menyusun kurikulum Nasional, tentu ada lembaga yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk merancang atau mengembangkan kurikulum yang akan digunakan secara nasional. Di Indonesia lembaga

⁵⁹Rusman, *Manajemen kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009),. 3

itu dikenal sebagai pusat kurikulum, yang berada di bawah badan penelitian dan pengembangan pendidikan nasional (Balitbang Diknas). Ada beberapa pemangku kepentingan yang menurut David G. Armstrong biasanya di libatkan dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

- 1) *Curriculum specialist* (spesialis kurikulum, ahli kurikulum)
- 2) *Teacher/instructors* (guru/instruktur)
- 3) *Learners* (peserta didik)
- 4) *Principals/corporate unit supervisors* (kepala sekolah/unit pengawas)
- 5) *Central office administrators/corporate administrators* (administrator kantor pusat/administrator perusahaan)
- 6) *Special expert* (ahli khusus)
- 7) *Lay public representation* (perwakilan masyarakat umum).⁶⁰

Pengembangan kurikulum, sebagaimana dikemukakan di atas adalah proses kompleks yang terdiri dari berbagai kegiatan mengakses kebutuhan, mengidentifikasi harapan hasil belajar, dan mempersiapkan proses pembelajaran untuk mengharapkan *outcome* hasil belajar. Tak kalah pentingnya adalah menyesuaikan program pembelajaran dengan budaya, social, dan berbagai kebutuhan orang-orang yang untuk merekalah kurikulum tersebut disiapkan.

Secara garis besarnya prinsip dan fungsi Manajemen Kurikulum dapat dibagi kedalam lima bagian, yaitu:

- 1) *Produktifitas*, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. pertimbangan ini dilakukan agar peserta didik dapat memperoleh hasil sesuai dengan tujuan kurikulum itu.
- 2) *Demokratisasi*, pelaksanaan kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subyek

⁶⁰Rohainan M. Noor, *The hidden curriculum (Membangun Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler)*, (Yogyakarta, Insan Madani, 2012), hlm. 8

- didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
- 3) *Kooperatif*, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif dari kerja sama pihak yang terlibat.
 - 4) *Efektifitas dan efisien*, rangkaian kegiatan manajemen harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum. efektifitas dan efisiensi yang dimaksudkan adalah terfokus pada pembiayaan, tenaga, dan waktu.
 - 5) *Mengarahkan visi, misi dan tujuan*, pada bagian ini proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi dan tujuan kurikulum.⁶¹

Selain prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas, maka perlu juga dipertimbangkan kebijaksanaan pemerintah, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum nasional, pedoman penyelenggaraan program pendidikan serta kebijakan lainnya menyangkut tentang penerapan manajemen kurikulum dalam satuan pendidikan.

Dalam proses pembelajaran dan penerapan pelaksanaan kurikulum, sebagaimana dikemukakan di awal pembahasan tulisan ini, bahwa sangat perlu dilakukan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Secara khusus, ada beberapa fungsi manajemen kurikulum, diantaranya;

- 1) Meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya kurikulum pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditetapkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.

⁶¹Rusman, *Manajemen kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 4

- 2) Meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara terintegrasi dalam mencapai tujuan kurikulum.
- 3) Meningkatkan revolusi dan efektifitas pembelajaran sesuai dengan dapat kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun aktifitas siswa dalam belajar.
- 4) Meningkatkan efektifitas kinerja guru maupun aktifitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang efektif dan profesional dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktifitas siswa dalam belajar.
- 5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar, proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian antara ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan.
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, kurikulum yang dikembangkan secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar, perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.⁶²

Penerapan Fungsi-fungsi pengelolaan kurikulum pada hakekatnya sama dengan penerapan fungsi ilmu manajemen pada umumnya yaitu, terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Melalui pelaksanaan kurikulum tentunya masih menggunakan fungsi-fungsi tersebut dalam rangka implementasi kurikulum pada satuan pendidikan. Namun demikian, fungsi-fungsi secara keseluruhan, peneliti tidak mendalami secara spesifik karena dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada fungsi pelaksanaan (implementasi) kurikulum.

⁶²*Ibid*, hlm. 5

GR. Terry, mengemukakan bahwa ada empat fungsi manajemen dalam pengelolaan pendidikan diantaranya:

1) Fungsi perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan suatu tujuan organisasi dan penentuan strategis, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Arti penting dari sebuah perencanaan adalah memberikan arah bagi setiap kegiatan sehingga sebuah kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin.⁶³

Perencanaan juga membawa manfaat dalam sebuah pengelolaan kurikulum diantaranya; (1) membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah lingkungan, (2) memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran kerja, (3) membantu penempatan tanggungjawab lebih tepat, (4) memberikan cara pemberian perintah untuk operasi, (5) memudahkan koordinasi diantara berbagai bagian organisasi, (6) membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah difahami, (7) menghemat waktu, usaha dan dana.⁶⁴

Menurut Handoko, bahwa terdapat empat tahapan dalam sebuah perencanaan yakni; (a) penetapan standar pelaksanaan, (b) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan (c) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, (d) pendampingan

⁶³ *Ibid*, hlm. 122

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 123

pelaksanaan kegiatan, (e) pengambilan tindakan, koreksi, bila diperlukan.⁶⁵

2) Fungsi Pengorganisasian

Dalam Tahapan ini, fungsi manajemen pengorganisasian lebih fokus kepada tindakan untuk melakukan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka bisa bekerja sama dengan orang lain. Dalam pekerjaan itu diharapkan adanya kegiatan yang bermanfaat, efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, agar memperoleh tujuan yang diinginkan.

3) Fungsi Pelaksanaan

Dari seluruh rangkaian proses manajemen pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama karena pada tahapan ini lebih menekankan pada kegiatan yang lebih nyata yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

4) Fungsi Pengawasan

Fungsi ini juga tak kalah pentingnya dalam sebuah organisasi, semua fungsi-fungsi yang terdahulu tidak akan efektif jika tidak dilakukan pengawasan (*controlling*). Pengawasan merupakan usaha yang bersifat sistematis untuk menetapkan standar pengawasan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan

⁶⁵*Ibid*, hlm. 124

untuk menjamin bahwa semua sumber daya pendidikan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian pengawasan adalah usaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan bahwa apakah tujuan organisasi tercapai. Dan jika terjadi penyimpangan, maka dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

Dari uraian tahapan manajemen di atas, jika dikaitkan dengan Implementasi Manajemen kurikulum dalam tulisan ini, maka orintasi pembahasannya lebih fokus terhadap mekanisme pengelolaan pembelajaran pendidikan agama islam (PAI) dalam tiga tahapan manajemen yakni tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi pembelajaran.

Ke-tiga tahapan pengelolaan ini terimplementasi ke dalam struktur desain dan inovasi pembelajaran melalui beberapa model-model pembelajaran, serta tahapan *saintifik* yang telah direkomendasikan dalam kurikulum 2013.

Penjelasan ini tertuang didalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses disebutkan bahwa ‘‘Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri

dan penyingkapan (*discovery*) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.⁶⁶

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka merupakan informasi penulis melakukan penelitian pada bidang ini. Tinjauan penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah :

Pertama, Penelitian yang dilaksanakan oleh Binti Choirun Ni'mah tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan judul “ *Implementasi Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Unggulan (MDTU) Wustha (Studi Kasus di Madrasah Muallimin Muallimat Al-Muwazanah, Gondang, Plosoklaten, Kediri).*”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan kurikulum. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang implementasi kurikulum yang diterapkan pada manajemen kurikulum terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui dan mengomparasikan persamaan dan perbedaan implementasi kurikulum PAI di SMPIT Subulul Huda Madiun dan Kurikulum PAI sebagai Rumpun di MTs Negeri 9 Magetan. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskripsi kualitatif, yang mendeskripsikan persamaan dan perbedaan implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam pada dua sekolah tersebut.

⁶⁶ Lihat Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, hlm. 11

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anang Darun Najah tahun 2016 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri dengan judul “*Studi Komparasi Implementasi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMAN 1 dan SMAN 6 Kota Kediri*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembelajaran siswa terkait budi pekerti yang ada pada siswa berbasis Sekolah Menengah Atas. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui dan mengomparasikan persamaan dan perbedaan implementasi kurikulum PAI di SMPIT Subulul Huda Madiun dan Kurikulum PAI sebagai rumpun di MTs Negeri 9 Magetan. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskripsi kualitatif, yang mendeskripsikan persamaan dan perbedaan implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam pada dua sekolah tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jaka Rebawa tahun 2015 Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul “*Studi Komparasi Implementasi Kurikulum KTSP dengan Kurikulum 2013 Mapel Pendidikan Agama Islam pada kajian standar kompetensi tahun pelajaran 2013/2014*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dirumuskan berkaitan dengan Implementasi KTSP dan kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Atas yang sudah memenuhi standar kompetensi, standar isi, dan standar kompetensi lulusan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui dan mengomparasikan persamaan dan perbedaan implementasi kurikulum PAI di SMPIT Subulul Huda Madiun dan Kurikulum PAI sebagai rumpun di MTs Negeri 9 Magetan. Metode yang penulis gunakan adalah metode

deskripsi kualitatif, yang mendeskripsikan persamaan dan perbedaan implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam pada dua sekolah tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan tahun 2017 Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul “*Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 4 Beton Siman Ponorogo*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah Implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran Aqidah Akhlak, Upaya Guru dan Madrasah dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada matapelajaran Aqidah-Akhlak dan menjelaskan kendala serta solusi mengenai implementasi kurikulum 2013 pada matapelajaran Aqidah-Akhlak di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 4 Beton Siman Ponorogo. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui dan mengomparasikan persamaan dan perbedaan implementasi kurikulum PAI di SMPIT Subulul Huda Madiun dan Kurikulum PAI sebagai Rumpun di MTsN 9 Magetan. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskripsi kualitatif, yang mendeskripsikan persamaan dan perbedaan implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam pada dua sekolah tersebut.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Prihadi tahun 2016 Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul “*Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Fikih Terhadap Pembentukan Perilaku Siswa di MTs Muhammadiyah 6 Beton Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap Implementasi kurikulum 2013 pada mata

pelajaran Fikih terhadap pembentukan perilaku siswa di MTs Muhammadiyah 6 Beton Siman Ponorogo. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui dan mengomparasikan persamaan dan perbedaan implementasi kurikulum PAI di SMPIT Subulul Huda Madiun dan Kurikulum PAI sebagai rumpun di MTsN 9 Magetan. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskripsi kualitatif, yang mendeskripsikan persamaan dan perbedaan implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam pada dua sekolah tersebut.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Sukamdi tahun 2014 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “*Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus di SDN Girimargo 1 dan SDN Gilimargo 2 Kecamatan Miri Kabupaten Sragen) Tahun Pelajaran 2013/2014*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap hasil penelitian yang tertuju pada pemaparan pelaksanaan dan faktor penghambat kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI yang berlangsung di SDN Girimargo 1 dan SDN Gilirejo 2 Kecamatan miri Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2013/2014. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui dan mengomparasikan persamaan dan perbedaan implementasi kurikulum PAI di SMPIT Subulul Huda Madiun dan Kurikulum PAI di MTs Negeri 9 Magetan. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan persamaan dan perbedaan implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam pada dua sekolah tersebut.

Dari telaah pustaka diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dengan focus kajian yang berbeda-beda, dari beberapa penelitian di atas penulis tertarik untuk membahas tentang implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagai rumpun, oleh karena itu untuk menghindari plagiasi maka penulis mengangkat tesis dengan judul dan rumusan masalah yang berbeda, yaitu dengan judul *“Implementasi Kurikulum PAI di SMPIT Subulul Huda Madiun dan Kurikulum PAI sebagai rumpun di MTsN 9 Magetan”*.